

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
PADA UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2021 – 2023

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN BERKALA								
No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuatan / Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia			Retensi Arsip
					Cetak	Rekam	Online	
<b>1.</b>	<b>Informasi tentang Profil UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Pimpinan OPD</b>							
a.	Visi dan Misi	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku
b.	Tugas Pokok dan Fungsi	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku
c.	Struktur Organisasi dan Profil OPD	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	Setiap adap perubahan			√	Selama berlaku
d.	Sumber Daya Manusia	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	Setiap ada perubahan			√	Selama berlaku
e.	LHKPN Pejabat yang sudah diverifikasi	Ka. Sub Bagian Kepegawaian & Pengembangan SDM	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	Selama berlaku
<b>2.</b>	<b>Informasi tentang Kegiatan dan Kinerja UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno</b>							
a.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno	Ka. Sub Bag Perencanaan & Evaluasi	Plt. Direktur	Setiap kegiatan			√	1 tahun
b.	Rencana Kerja UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 2020	Ka. Sub Bag Perencanaan & Evaluasi	Plt. Direktur	Setiap kegiatan			√	1 tahun

c.	DPA dan DPPA Informasi mengenai Pelaksanaan Anggaran (Penetapan dan Perubahan) UPTD RSUD DR. (H.C) IR. SOEKARNO	Ka. Bag Keuangan dan Perencanaan	Plt. Direktur	2021			√	1 tahun
<b>3.</b>	<b>Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan</b>							
a.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 2020	Ka. Sub Bag Perencanaan & Evaluasi	Plt. Direktur	Tahunan			√	1 tahun
b.	Rencana Kerja UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 2021	Ka. Sub Bag Perencanaan & Evaluasi	Plt. Direktur	Tahunan			√	1 tahun
c.	Target Capaian UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 2021	Ka. Sub Bag Perencanaan & Evaluasi	Plt. Direktur	Tahunan			√	1 tahun
<b>4.</b>	<b>Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan</b>							
a.	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Setiap Tahun (Audited)	Ka. Bag Keuangan & Perencanaan	Plt. Direktur	2021			√	1 tahun
b.	Rincian Data Pendapatan Dana BLUD & Covid-19 (BPJS Kesehatan) Tahun 2020 dan Tahun 2021	Ka. Bag Keuangan & Perencanaan	Plt. Direktur	2021			√	1 tahun
c.	Laporan Pemakaian Anggaran Tahun 2020	Ka. Bag Keuangan & Perencanaan	Plt. Direktur	2021			√	1 tahun
d.	Laporan Pengeluaran Anggaran Tahun 2020	Ka. Bag Keuangan & Perencanaan	Plt. Direktur	2021			√	1 tahun
e.	Laporan Pemakaian Anggaran Tahun 2021	Ka. Bag Keuangan & Perencanaan	Plt. Direktur	2022			√	1 tahun
f.	Laporan Pengeluaran Anggaran Tahun 2021	Ka. Bag Keuangan & Perencanaan	Plt. Direktur	2022			√	1 tahun
<b>5.</b>	<b>Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik</b>							

a.	Jumlah Permohonan Informasi Publik	PPID	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	1 tahun
b.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik	PPID	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	1 tahun
c.	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan maupun yang ditolak	PPID	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	1 tahun
d.	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	PPID	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	1 tahun
<b>6.</b>	<b>Informasi Mengenai Hak Memperoleh Informasi di OPD</b>							
a.	Tata cara memperoleh informasi publik	PPID	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	Selama berlaku
b.	Tata cara mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik	PPID	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	Selama berlaku
c.	Tata cara atas tidak ditanggapi/tidak puas jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik	PPID	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	Selama berlaku
d.	Form permohonan dan keberatan	PPID	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	Selama berlaku
<b>7.</b>	<b>Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelanggaran di OPD</b>							
a.	Alur/Skema Pengaduan (Tata Cara)	PPID	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	Selama berlaku
b.	Form/Lembar Isian Pengaduan	PPID	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	Selama berlaku
c.	Kontak Pengaduan ke Pejabat yang berwenang menerima pengaduan dan Penyalahgunaan wewenang	PPID	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	Selama berlaku

d.	Hasil penanganan pengaduan	PPID	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	Selamaberlaku
8.	<b>Informasi Peraturan, Keputusan, dan atau Ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno</b>	<b>Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID</b>	<b>Plt. Direktur</b>	<b>Setiap ada perubahan</b>			√	<b>Selama berlaku</b>

#### INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SETIAP SAAT

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Unit Kerja Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuatan / Penerbitan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia			Retensi Arsip
					Cetak	Rekam	Online	
1.	Daftar Informasi Publik yang disediakan di website UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	1 tahun
2.	Rencana Strategis (2017 s/d 2022)	Ka. Sub. Bag Perencanaan & Evaluasi	Plt. Direktur	Pembuatan 2017 dan Perubahan 2021			√	5 tahun
3.	SOP Penyelenggaraan Pengaduan Masyarakat Secara Langsung	Ka. Sub Bag Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku
4.	SOP Penyelenggaraan Kerjasama antara RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno dengan pihak ketiga	Ka. Sub Bag Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku
5.	SOP Pembuatan Informasi Publik di Media Sosial	Ka. Sub Bag Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku
6.	SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Faximile	Ka. Sub Bag Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku
7.	SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Kotak Surat	Ka. Sub Bag Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku

8.	SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui SMS/WA/Email/Aplikasi E-Lapor/PIPP	Ka. Sub Bag Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku
9.	SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Telepon	Ka. Sub Bag Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku
10.	SOP Pelayanan Pengambilan Gambar/Foto/Video di Lingkungan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno	Ka. Sub Bag Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku

### INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan / Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia			Retensi Arsip
					Cetak	Rekam	Online	
1	Informasi jumlah pasien covid-19 di fasilitas RS Covid RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno	Ka. Bag Hukum, Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	1 tahun

### INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	JENIS INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
						AKIBAT JIKA INFO TERBUKA	MANFAAT JIKA INFO TERTUTUP
1.	<b>Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum</b>	Alat bukti kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.18/2003 ttg Advokat.</li> <li>Hukum Acara Perdata.</li> <li>Hukum Acara Pidana</li> </ul>	Mengamankan dan melindungi alat bukti.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang.	Merugikan pihak dalam proses berperkara.	Melindungi kerahasiaan alat bukti.
		Dokumen penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.19/2003 ttg Advokat.</li> <li>Hukum Acara Perdata.</li> </ul>	Mengamankan dan melindungi dokumen perkara	Tidak terbatas/kecuali	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan alat bukti

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum Acara Pidana.</li> </ul>		karena ketentuan Undang-Undang		
		Opini hukum (legal opinion)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Jaksa Agung No.Kep225/A/JA/3/2003 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara</li> <li>• UU No.18/2003 ttg Advokat</li> </ul>	Mengamankan, melindungi dokumen hukum.	Tidak terbatas	Membuka kerahasiaan opini hukum legal opinion)	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum.
		Surat/memo/ catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Mengamankan, melindungi dokumen hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan UndangUndang	Mengganggu proses hukum.	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum
		Proses hukum PNS bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak terbatas Sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-Undang	Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.18/2003 ttg Advokat</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>• Hukum Acara Perdata/Pidana</li> </ul>	Belum berkekuatan hukum tetap.	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan UndangUndang	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamankan dan melindungi alat bukti</li> <li>• Tidak mengganggu/menghambat proses hukum</li> </ul>
2.	<b>Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat</b>	Rincian Harga Satuan dalam Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>• Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa	Mengakibatkan persaingan tidak sehat dalam pelelangan	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan
		Dokumen Pendukung Pengadaan Barang Dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No.70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	Menjamin kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpres No. 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>• Pasal 17 B, 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>• Kepmen PU no. 391/KPTS/M/2011</li> </ul>				
		Dokumen Penawaran Penyedia Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No.70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>• Kepmen PU no. 391/KPTS/M/2011</li> </ul>	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Tidak terbatas	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
		Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>• Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011</li> <li>• Undang-undnag nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>• Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> </ul>	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Sampai dengan penyerahan ke dua (FHO)	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak
3.	<b>Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi</b>	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

		<p>Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS (Data Rekam Medis)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>• Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10</li> </ul>	<p>Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi</p>	<p>Tidak terbatas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi PNS</li> <li>• Melanggar HAM</li> </ul>	<p>Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</p>
		<p>Hasil evaluasi kapabilitas, intelektulitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>• PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural</li> <li>• PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000</li> <li>• PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> <li>• PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>				

		Catatan yang menyangkut pribadi seorang Pejabat dan PNS yang berkaitan dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS	Melanggar HAM Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
4.	<b>Memorandum atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan</b>	Biodata elektronik PNS (database)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d H</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Terhindar dari penyalahgunaan/pengeditan/rekayasa oleh pihak lain	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi PNS</li> <li>• Melanggar HAM</li> </ul>	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28H</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	Melindungi/ menjamin kerahasiaan data pribadi PNS	Sampai mendapat ijin dari pejabat yang berwenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi PNS</li> <li>• Melanggar HAM</li> </ul>	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 I, 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>• UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian</li> </ul>	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Terbatas sampai dengan Mutasi /Pengangkatan	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum

		Dokumen/ Berkas/Arsip PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d H</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi PNS</li> <li>• Melanggar HAM</li> </ul>	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H.</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi PNS</li> <li>• Melanggar HAM</li> </ul>	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H.</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi PNS</li> <li>• Melanggar HAM</li> </ul>	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Data rekam medis PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H.</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>• Permenkes RI no. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang</li> </ul>	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi PNS</li> <li>• Dapat merugikan PNS</li> <li>• Melanggar HAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> <li>• Untuk melindungi Keamanandan</li> </ul>
		Data usulan pengangkatan PNS dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H.</li> </ul>	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses	Menjaga kondusifitas, keamanan dan

		jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>• PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dlm Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000.</li> </ul>	pembinaan PNS		penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	kepastian hukum.
5.	<b>Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundangundangan</b>	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundangundangan dan aturan pelaksanaannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i.</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ul>	Menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak terbat	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.
6.	<b>Rahasia jabatan</b>	Rahasia jabatan	UU No. 43 Tahun 1999 tentang Poko-pokok Kepegawaian	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen
7.	<b>Belum dikuasai atau didokumentasi</b>	Data Perencanaan (Gambar, RAB, RKS) sebelum lelang dan pengadaan berlangsung)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Terbatas sampai dengan audit dari BPK	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak

	Dokumen Kontrak beserta Data Pendukung	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Terbatas sampai dengan audit dari BPK	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak
	Dokumen RKA	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Terbatas sampai dengan audit dari BPK	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak

Ditetapkan di Bangka

Tanggal Januari 2023

Plt. Direktur

UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



dr. IRA AJENG ASTRIED

Pembina Tk. I

NIP. 19770520 200501 2 013

